

## SINOPSIS

Sistem pemerintahan saat ini yang menuntut terbentuknya pemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai prinsip *Good Governance*. Sistem manajemen pemerintah harus dikembangkan menjadi sistem manajemen organisasi jaringan yang dapat memperpendek lini pengambilan keputusan. INPRES No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government* mengamanatkan kepada lembaga pemerintahan, termasuk Pemerintah Daerah Kab. Bengkalis melalui KPDE untuk melaksanakan 6 langkah strategi tentang *e-Government*. Dari hal diatas maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu bagaimanakah kebijakan Pemerintah Daerah Kab. Bengkalis mengenai implementasi INPRES tersebut ?

Skripsi ini mengambil judul **“Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi INPRES No.3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government”**. Dengan obyek penelitian di Kantor Pengolahan Data Elektronik Kab. Bengkalis. Alasan penelitian untuk mengetahui implementasi INPRES No. 3 Tahun 2003, yang ditujukan kepada lembaga pemerintah. Adapun tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi INPRES No.3 Tahun 2003 dan untuk mengetahui pemahaman Pemerintah Daerah Bengkalis tentang INPRES No.3 Tahun 2003. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Unit analisisnya adalah Kepala dan Staf KPDE serta 50 orang dari masyarakat sebagai responden. Sumber Datanya adalah data primer dan data sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dokumentasi, dan kuesioner. Jenis penelitiannya adalah deskriptif yaitu hanya dengan menggambarkan suatu keadaan obyek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang nyata, atau sebagaimana adanya tanpa menganalisis data dengan rumus-rumus statistik.

Dari hasil penelitian yang diperoleh, pada strategi pertama mengenai website Pemerintah Daerah sebagai sistem pelayanan yang handal bagi masyarakat dirasa kurang, sedangkan mengenai informasi yang disampaikan cukup dipercaya. Mengenai kemudahan akses dirasa sulit dan mahal. Pada strategi kedua, mengenai sistem dan proses kerja Pemerintah Daerah dengan penggunaan website tidak berubah, sedangkan mengenai data yang disampaikan tidak *up to date*. Pada strategi ketiga yakni pemanfaatan Teknologi Informasi tidak optimal, Pemerintah Daerah Kab. Bengkalis kurang siap menghadapi perubahan tata pemerintahan. Pada Strategi keempat, pihak swasta kurang dilibatkan, kemudian keterlibatan pihak swasta sangat setuju. Pada strategi kelima SDM kurang baik, sedangkan untuk meningkatkan kualitas SDM pelatihan menjadi hal utama, untuk sosialisasi kurang. Mengenai kesiapan masyarakat memanfaatkan internet kurang siap. Pada strategi keenam belum semua tahap dapat dilakukan dan masih dalam tahap perencanaan. Pemerintah Daerah Kab. Bengkalis khususnya KPDE akan memberikan yang terbaik bagi masyarakat, karena saat ini masyarakat membutuhkan informasi yang